

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Anggrayni, I. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Sektor Pengupahan yang Didasarkan Pada Undang–Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 15-29.
- Anwaruddin, A. (2004). Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 1(2), 1-16.
- Aysah, A. S. N. (2024). Peran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemberian Upah Minimum: Kesesuaian dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengan Nomor 561/57 Tahun 2023. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 112-119.
- Cova, J. (2025). State intervention in low-wage work: Politics, social actors, and increased governmental control in the setting of the minimum wage. *European Journal of Industrial Relations*, 31, 345 - 368.
- Destiana, S.Z., Suhartini, E., & Sihotang, S. (2024). Legal Consequences For Companies That Enforce Wages Below Government Policy. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. 7(4), 2712-2721.
- Dwianisa, S., & Andriyani, S. (2025). Kebijakan Upah Minimum Dan Perlindungan Buruh Pabrik Dalam Perspektif Hukum Dan HAM. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 123-131.
- Faizah, N.A.G., & Wijaya, R.M. (2025). Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam Penetapan Struktur dan Skala Upah. *Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern*, 7(1).
- Getembe, E.M. (2025). Examining how Labor Issues Significantly Impact Kenya's Economic and Social Development, Shaping Employment Patterns. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*.
- Haifa, A. H., & Khikmah, N. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Tenaga Kerja atas Pengawasan Hubungan Kerja dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 28-36.
- Husni, A.H., Rusli, A. M., Syamsu, S., & Ansar, M. C. (2023). Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 275-298.
- Jadoon, A. K., Tanveer, A., Javed, M. F., & Sarwar, A. (2021). Minimum wages and poverty: A cross-country analysis. *Asian Economic and Financial Review*, 11(8), 632.

- Mandari, Q. S. S., Widodo, E., & Hamdani, F. (2025). Urgensi hak buruh dalam kebijakan pengupahan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 243-259.
- Primadianto, I. A., Pamuji, K., & Kunarti, S. (2022). Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Penerapan Upah Minimum Di Jawa Barat. *Soedirman Law Review*, 4(2).
- Purnama, N. S., & Amelia, H. (2021). Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Pemuliaan Hukum*, 4(1), 63–82.
- Purwanto, A. (2025). The Role of Tripartite LKS to Increase Work Productivity and Conductivity. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 6(2), 12-16.
- Putri, D. K. (2024). Polemik Penetapan Upah Minimum Pekerja: Kebutuhan dan Gaji Minimum Yang Tidak Seimbang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 273-279.
- Siagian, S. L. Y., & Maramis, R. A. (2023). Kedudukan Dewan Pengupahan dalam Menentukan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Lex Administratum*, 11(5).
- Siregar, I. M., Amin, M., & Eriton, M. (2024). Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Masalah Upah Minimum Di Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 314-328.
- Soedjarwo, R.S., Karim, D.K, & Sugiharto, D. (2025). Juridical Study of The Provision of Payment of Wages Below The Minimum Wage By Employers To Workers. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*.
- Tarumingkeng, F., Rompas, W., & Ruru, J. (2022). Pengawasan Pemerintah dalam Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(114).
- Wibowo, S. H., & Rasji, R. (2023). Tinjauan Yuridis Pembayaran Upah Pekerja Di Bawah Upah Minimum Oleh Pengusaha Paska Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 4442-4450.

Buku:

- Amrullah, M. Kholis. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Astuti, R. S., dkk. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: DAP Press.
- Darmadi, Damai., & Sukidin. (2009). Administrasi Publik. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

- Ekowati, Mas Roro Lilik. (2009). *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Ghafur, A. Hanief. S. (2022). *Kebijakan Publik: Memperkuat Basis Kebudayaan dalam Kebijakan*. Malang: Intrans Publishing.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Keban, Yeremias. T. (2019). *Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Miles, Matthew. B., dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. California: Sage Publications, Inc.
- Moloeng, Lexy. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. (2017). *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Tugas Akhir:

- Ashiddiqi, M. F. (2024). *Implementasi Kebijakan Pengupahan Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Implementation Of Wage Policy By The Tasikmalaya City Manpower Office (Undergraduate Thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta)*.
- Citra, C. B. (2023). *Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 di Kota Makassar= Oversight by the Manpower Office of the Implementation of the 2021 City Minimum Wage in Makassar City (Undergraduate Thesis, Universitas Hasanuddin)*.
- Hapsari, I. (2022). *Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Tangerang (Studi Pt. Ecowell Makmur Horistik) (Undergraduate Thesis, Universitas Nasional)*.

ROSIDHA, S. A. (2024). Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten Kendal (Undergraduate Thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang).

Peraturan:

Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018.

Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2024.

Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020.

Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2016.

Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2023.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2020.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2003.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2023.

Pemerintah Kota Cilegon. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja. Cilegon: Pemerintah Kota Cilegon, 2022.

Pemerintah Provinsi Banten. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025. Serang: Pemerintah Provinsi Banten, 2024.

Website:

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2025, 25 Maret). Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon triwulan IV 2024. BPS. <https://cilegonkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/25/192/pertumbuhan-ekonomi-kota-cilegon-triwulan-iv-2024.html>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Metode baru: Pengeluaran per kapita disesuaikan. BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE2IzI=-/metode-baru-pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>

Fakta Banten. (2024, 20 Februari). Perusahaan subkontraktor PT Lotte masih bayar upah murah, ini kata Disnaker Cilegon. <https://faktabanten.co.id/cilegon/perusahaan-subkontraktor-pt-lotte-masih-bayar-upah-murah-ini-kata-dinsnaker-cilegon/>

Kompas.id. (2024, 04 Desember). Nilai kenaikan sebesar 6,5 persen berlaku untuk UMP dan UMK tahun 2025. <https://www.kompas.id/artikel/nilai-kenaikan-sebesar-65-persen-berlaku-untuk-ump-dan-umk-tahun-2025>

Radar Banten. (2024, 11 Desember). Tolak kenaikan UMP 6,5 persen, Apindo Banten sampaikan usulan relevan 2,51 persen. https://www.radarbanten.co.id/2024/12/11/tolak-kenaikan-ump-65-persen-apindo-banten-sampaikan-usulan-relevan-251-persen/#google_vignette

Radar Banten. (2025, 15 Mei). *Pelanggaran!* Ratusan karyawan dua perusahaan di Cilegon tak digaji selama delapan bulan. https://www.radarbanten.co.id/2025/05/15/pelanggaran-ratusan-karyawan-dua-perusahaan-di-cilegon-tak-digaji-selama-delapan-bulan/#google_vignette

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (n.d.). Lembaga Kerjasama Tripartit. https://setneg.go.id/baca/index/lembaga_kerja_sama_tripartit_1?utm_source=chatgpt.com

Suara.com. (2023, 1 Desember). Diupah rendah oleh PT SKM, warga dan buruh ngadu ke DPRD Cilegon. <https://banten.suara.com/read/2023/12/01/072754/diupah-rendah-oleh-pt-skm-warga-dan-buruh-ngadu-ke-dprd-cilegon>

Tribun Banten. (2024, 23 April). 3 perusahaan di Cilegon dilaporkan diduga karena bayar gaji karyawan di bawah UMK. <https://banten.tribunnews.com/2024/04/23/3-perusahaan-di-cilegon-dilaporkan-diduga-karena-bayar-gaji-karyawan-di-bawah-umk>

Tribunnews Banten. (2024, 17 Desember). Didemo ribuan buruh yang minta kenaikan UMK, begini respon Pj. Gubernur Banten, Ucok Damenta. <https://banten.tribunnews.com/2024/12/17/didemo-ribuan-buruh-yang-minta-kenaikan-umk-begini-respon-pj-gubernur-banten-ucok-damenta>